JURNAL ILMU PEMERINTAHAN *Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022*
Terbit online pada http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(Studi Kasus Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan)

Pungky Rizki Yusandy[1]; Yusuf Adam Hilman[2];
[12]Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email : Pungkyrizki11@gmail.com; adam_hilman@umpo.ac.id

Abstract

The dynamics in this study are related to the role of the village government in the practice of Community Empowerment, especially for MSMEs in Sumbersawit Village, Sidorejo Distric, Magetan Regency. This study aims to determine the role of the Village Government in the practice of Empowerment for MSMEs in the Village. Researchers try to reveal a picture, knowledge, and also gain an understanding, using qualitative research methods. The results of this study: 1). The Sumbersawit Village Government is carrying out its role less well, this can be seen through the implementation of the new program to be implemented. Many entrepreneurs complain that their capital is mediocre, and a new aid program will be implemented this year. The inhibiting factors faced by the Sumbersawit Village government, namely the lack of information from the government to the community and the slowness of the Village government in taking action from businessmen's complaints.
Keyword : MSME, Empowerment, Government

Abstrak

Dinamika dalam kajian ini berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam praktik Pemberdayaan Masyarakat khususnya bagi UMKM di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam praktik Pemberdayaan bagi UMKM di Desa. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan sebuah gambaran, pengetahuan, dan juga memperoleh sebuah pemahaman, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini: 1). Pemerintah Desa Sumbersawit menjalankan perannya kurang baik, hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan program yang baru akan dilaksanakan. Banyaknya pengusaha yang mengeluh dengan modal yang paspasaan, dan program bantuan baru akan dilaksanakan tahun ini. 2). Faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sumbersawit, yaitu kurangnya informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan lambatnya pemerintah Desa dalam melakukan tindakan dari keluhan pengusaha.
***Keyword : LSM, Pemberdayaan,* Pemerintahan**

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi prioritas utama, selain karena faktor viral atau sesuatu yang menjadi perbincangan di khalayak umum, banyak permasalahan seperti rendahnya pendapatan negara yang dihadapi sehubungan dengan pembangunan dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian baik dalam skala regional atau kerjasama antara suatu Desa dengan Desa lain maupun nasional atau kerjasama ditingkat nasional.

Perbaikan kondisi perekonomian tersebut dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena sumber daya manusia yang rendah menjadikan kondisi masyarakat kurang mampu dalam melihat serta mengatasi masalah dalam hidupnya yang kemudian akan berdampak pada pengangguran.

Pemberdayaan adalah sebuah *proses menjadi*, bukan sebuah *proses instan*. Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh, suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Melinda, N., & Najmudin, D. 2021).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada (Sucipto dan Sutarto, 2015). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu Desa/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu Desa. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang tejadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut (Muhamad, Ade, 2015).“.

Suatu usaha bisa di katakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerja dalam suatu produktifitas yang di jalaninya. Selain itu usaha kecil menengah juga perlu adanya strategi agar dapat mencapai suatu sasaran sehingga dengan itu semua akan terkontrol dengan baik. Dengan menggunakan strategi maka suatu Badan Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah (UMKM) akan dapat berkembang sesuai dengan harapan. Pengembangan organisasi adalah usaha terencana dikaitkan dengan peningkatan kreatifitas, ketrampilan, menyelesaikan masalah, pembelajaran dan perkembangan manusia dalam organisasi. Selain itu juga dapat mengubah tujuan dan strategi, teknologi, desain jabatan, struktur, proses dan orang - orangnya.

Adapun program yang ada di desa Sumbersawit adalah : (1) Pemberdayaan UMKM yang mana Peran pemerintah adalah memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha ini. Kemudian ada satu hal lagi yang dimunculkan oleh Kementerian Keuangan yaitu usaha mikro. Jadi ini diberikan kepada masyarakat kelompok pelaku usaha yang lebih mikro, ultra mikro, (2) BUMdes BUMDes sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa, (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Pertanian yang di dalam program ini pelatihan dan pembinaan petani Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Desa Sumbersawit memiliki Pemberdayaan masyarakat antara lain Kelompok tani di tiap dusun desa Sumbersawit dan terdapat UMKM yang di dirikan oleh masyrakat dan di biayai oleh pemerintah contohnya yaitu pengrajinan Kripik gadung. Dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat salah satunya di bidang ekonomi. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap Peran Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sumbersawit pada usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. METODE

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperoleh suatu gambaran, pengetahuan dan dan memperoleh pemahaman. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif didasarkan pada maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menggambarkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan memahami bagaimana peran pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menjadi lebih maju. dilakukan selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021.

Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian ini, diperlukan data yang relevan. Melalai data, peneliti dapat mampu mengetahui secara langsung fenomena social yang terjadi di lapangan yang kemudian di analisis menggunakan teori-teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Menurut John W. Creswell langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak, dokumentasi dan lain-lain (Creswell, 2013). Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : (1) Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada pengamatan ini peneliti

merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti (Creswell, 2013). Oleh sebab itu, peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang relevan sehingga dapat menguatkan dan mendukung hasil wawancara. (2) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011).

Teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara secara mendalam yang dilakukan secara sistematis kepada pihak yang mengerti dan paham tentang fenomena dan kondisi dilapangan serta memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti sehingga dapat memperkuat data yang dimiliki oleh peneliti. (3) Dokumentasi, Menurut Lincoln dan Guba, ada dua macam metode dokumenter yaitu dokumen dan record. Dokumen merupakan bahan tertulis, sedangkan record adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa (Nazir, Moh. 2013).

Setelah memperoleh data dan informasi melalui proses wawancara, observasi serta dokumentasi maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menganalisis data dan informasi tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah didapat dari terjun langsung dilapangan melalui berbagai sumber narasumber, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya. Analisis data terdiri dari alur kegiatan yang saling m enjalin pada saat sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berikut skema alur analisis data yang dilakukan :

Gambar 1 Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif

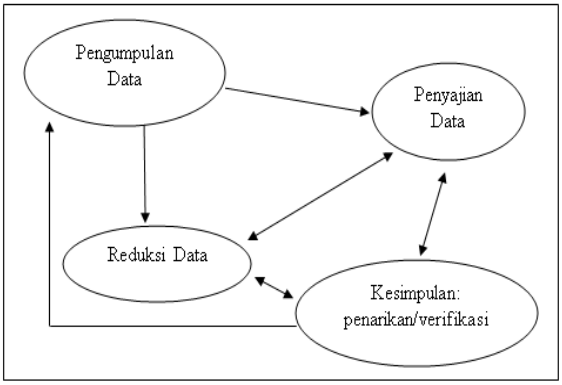

Sumber: (Miles dan Huberman, 2010)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Secara kualitatif, penelitian yang dilakukan menghasilkan data sebagai berikut:

Para pelaku UMKM di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo kabupaten Magetan. Hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo antara lain:

1. Pada aspek permodalan, sebagian UMKM masih menggunakan modal sendiri dan tidak menggunakan akses kredit karena kekhawatiran dalam hal pelunasan disamping sebagian besar tidak memiliki jaminan yang memadai.
2. Pada aspek produksi, sebagian besar UMKM masih menggunakan peralatan produksi yang sederhana, meskipun hal tersebut memberi keuntungan dalam hal biaya produksi yang terjangkau, namun peralatan yang masih tradisional

menyebabkan produksi kurang efisien, khususnya apabila terdapat pesanan produksi dalam jumlah besar.
3. Pada aspek teknologi, sebagian besar UMKM belum terkomputerisasi dalam kegiatan operasional nya, seperti menerapkan pemasaran online.
4. Pada aspek pemasaran, sebagian besar UMKM belum mematenkan produk, belum terdapat diferensiasi produk dan belum memiliki kerjasama dengan perusahaan besar terkait bahan baku maupun penjualan produk.
5. Pada aspek sumber daya manusia, sebagian besar UMKM belum memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang ditandai dengan belum dipisahkannya keuangan pribadi dengan perusahaan.
6. Pada aspek sosial ekonomi, sebagian besar UMKM kurang siap dengan perubahan kondisi ekonomi seperti ketidakstabilan politik dan pasar bebas dan kondisi pandemi covid-19.
7. Pada aspek kelembagaan, belum adanya lembaga yang mengelola keberadaan UMKM di Desa Sumbersawit.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung, sebagaimana yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Pada hasil wawancara, Peran Pemerintah Desa masih kurang terkait dalam proses produksi dan pemasaran produk hasil olahan UMKM Desa Sumbersawit. Beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM menjadi perhatian utama dalam proses pembangunan inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Desa dalam rangka otonomisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana Peran pemerintah desa dalam Pemberdayaan masyarakat pada UMKM di Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo kabupaten Magetan. Adapun untuk saat ini Pemerintah Desa Sumbersawit melakukan pengembangan UMKM di Desa Sumbersawit yaitu :

1. Peningkatan Pelatihan Kemampuan
Pelatihan kemampuan dengan memberikan pengetahuan yang lebih banyak maka akan dapat membantu pemilik usaha dan pekerja dalam mengelola usahanya tersebut. Namun, pada kenyataannya menurut hasil wawancara, kebanyakan dari mereka tidak mengikuti sosialisasi tersebut karena kurangnya informasi.

2. Promosi dan Pemasaran
Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan promosi sudah cukup baik hanya saja ketika ingin melakukan promosi baiknya harus dengan cara membeli bukan hanya mengambil saja, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Pinjaman Modal
Saat ini kegiatan yang akan diluncurkan oleh pemerintah desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa semua program tersebut mengarahkan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan sejahtera adapun program pinjam usaha yang di khususkan untuk para perempuan yang mengarahkan bahwa ibu rumah tangga harus tetap produktif dan kreatif. Hal ini juga akan membantu perekonomian di rumah tangga. Pinjaman yang digulirkan untuk modal usaha dimuali dari besar plafound yang diberikan kepada setiap nasabahnya adalah Rp. 3000.000,. (tiga juta rupiah) atau sebesar pinjaman yang diajukan oleh nasabah.
Untuk mendapatkan modal tersebut tata caranya cukup memudahkan masyarakat untuk meminjamnya dengan melampirkan beberapa persyaratan yang

dapat dipertanggungjawabkanoleh pihak-pihak yang terkait dalam program ini adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a) Dengan melampirkan photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
b) Dengan melampirkan photo copy KK (Kartu Keluarga)
c) Simpan pinjam ini diajukan menggunakan sistem kolektif atau sistem kelompok

4. KESIMPULAN

Pemerintah Desa Sumbersawit menjalankan perannya kurang baik, hal ini dapat dilihat melalui pelaksana program yang baru akan dilaksanakan. Banyaknya pengusaha yang banyak mengeluh dengan berbagai keluhan contohnya keluhan dengan modal yang paspasa, dan program bantuan baru akan dilaksanakan tahun ini. Pemerintah Desa Sumbersawit dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sumbersawit, yaitu kurangnya dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat masih perlu pendekatan lebih, dan lambatnya pemerintah Desa dalam melakukan tindakan dari keluhan pengusaha.

5. DAFTAR PUSTAKA

Melinda, N., & Najmudin, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rumah Belajar pada Masa Pendidikan Jarak Jauh di Rw 006 Kelurahan Cisurupan. Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 1(10), 163–180. Retrieved from https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/639.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (2010). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Muhamad, Ade, (2015).“Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan”.

Moleong, Lexy J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994.